

**KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DALAM
DISEMINASI INFORMASI
(Studi Kasus KIM Kraton Kidul Pekalongan-Jawa Tengah)**

Manik Sunuantari (Universitas Sahid Jakarta)
Email : manik_sunuantari@yahoo.com
Hp : 08161654868

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia perlu melakukan pembenahan di berbagai sektor dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya ekonomi, tetapi juga di diseminasi informasi. Dampak globalisasi menyebabkan ketergantungan terhadap akses informasi, melalui informasi tersebut diharapkan masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemeninfo) sebagai pusat informasi bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi di bidang informasi mempunyai peran yang besar dalam diseminasi informasi publik. Salah satu terobosan yang dilakukan Kemeninfo melalui Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik melakukan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam diseminasi informasi publik di seluruh penjuru kelurahan yang ada di wilayah Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah, dalam hal ini Kemeninfo sebagai pengelola kebijakan pemerintah di bidang informasi dengan menitik beratkan pada peran KIM dalam diseminasi informasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang diseminasi informasi, *agent of change*, dan KIM. Sedangkan metode yang digunakan adalah studi kasus, dengan memilih KIM Kelurahan Kraton Kidul sebagai subyek penelitian yang berlokasi di Kota Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan diseminasi informasi, KIM sebagai ujung tombak di level bawah mampu berfungsi secara maksimal jika melakukan kemitraan dengan berbagai instansi terkait, bergantung pada isu yang sedang trend dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan Kemeninfo sebagai mitra utama berfungsi untuk memfasilitasi serta melakukan pendampingan dari mulai pembentukan KIM, proses diseminasi informasi, bahkan sampai tahap implementasi kebijakan di masyarakat.

Kata Kunci : Diseminasi Informasi, Agent of Change, KIM

Pendahuluan

Membangun masyarakat informasi dalam rangka perwujudan masyarakat informasi tidak mudah membalikkan telapak tangan, terutama di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi keputusan yang sudah disepakati dalam WSIS (*World Summit on the Information Society*) di Genewa tahun 2003 yang kemudian dilanjutkan tahun 2005 di Tunisia, bahwa perwujudan masyarakat informasi diutamakan untuk masyarakat pedesaan. Sebagai salah satu negara berkembang, negara Indonesia juga tidak terlepas dari masalah pendayagunaan informasi dan komunikasi dalam rangka menciptakan masyarakat informasi. Berbagai pesan pembangunan di Indonesia sering mengalami kemacetan dalam proses penyampaian. Kemacetan aliran komunikasi terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga dalam pelaksanaannya selalu terjadi tumpang tindih antara pusat dan daerah. Prinsip Deklarasi WSIS tersebut adalah mengendalikan potensi teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan tujuan pembangunan sesuai dengan Deklarasi Millenium, yaitu mengurangi masalah kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim; pencapaian pendidikan dasar yang universal, kesamaan gender dan pemberdayaan perempuan, serta perbaikan kesehatan.

Terkait dengan kondisi tersebut, maka dalam rangka membangun masyarakat informasi pemerintah Indonesia menganggap perlu untuk melakukan pembenahan di sektor teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini dilakukan karena faktor ketersediaan infrastruktur yang terkait dengan kemampuan ekonomi masyarakat pedesaan masih jauh dari harapan. Rendahnya kualitas SDM, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan ditengarai menjadi penyebab rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka pemerintah Indonesia melalui Kemeninfo melakukan pengaturan kebijakan dalam pengelolaan informasi secara timbal balik. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap kelurahan yang ada di Indonesia. Melalui KIM inilah, maka proses penyebaran informasi dapat

menjangkau masyarakat sampai ke pedesaan, daerah terpencil, serta wilayah lain yang tidak terjangkau oleh media massa.

Meningkatnya pembentukan KIM diharapkan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang berkembang. Dengan berkembangnya KIM yang semakin meluas di masyarakat, diharapkan Indonesia siap menghadapi datangnya peradaban masyarakat informasi, sebagai tatanan kehidupan masyarakat global. terhadap informasi. Melalui aktivitas pengelolaan informasi, yaitu ADINDA (**A**kses Informasi, **D**iskusi Informasi, **I**mplementasi, **N**etworking, **D**iseminasi, dan **A**spirasi), diharapkan mampu meningkatkan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa.

Kondisi demikian semakin memacu Pemkot Pekalongan untuk lebih menggiatkan program-program pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan pembentukan KIM di setiap kelurahan yang ada di Kota Pekalongan, melalui KIM diharapkan terjadi proses diseminasi informasi. Melalui KIM masyarakat mampu memanfaatkan informasi untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Hal inilah yang mendorong KIM Kraton Kidul yang berada di wilayah kelurahan Kraton Kidul giat bergerak dalam aktivitas informasi.

Tinjauan Pustaka

1. Diseminasi Informasi

Dalam PerMen Kominfo No.17/PER/M.Kominfo/03/2009, pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Diseminasi Informasi Nasional adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat. Melalui Diseminasi Informasi Nasional bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat integritas nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pola penyebaran informasi tidak lagi mengacu pada pola *top down*, tetapi dengan pola *bottom up*. Masyarakat ikut terlibat aktif dalam rangka pendayagunaan informasi dan komunikasi. Untuk itu diharapkan melalui penelitian ini akan dapat diketahui pola komunikasi kelompok yang terjadi di masyarakat sehingga dapat diketahui kebutuhan khalayak terhadap informasi pembangunan. Dengan demikian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berasal dari masyarakat lokal, melalui input dari masyarakat lokal akan diketahui kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.

Diseminasi Informasi dilakukan menggunakan sarana komunikasi, seperti ; media massa, media baru (media online), media tradisional, media interpersonal, media luar ruang yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Bahkan pemerintah berupaya memberikan prasarana lain berupa siaran keliling dengan mobil sebagai pendukung diseminasi informasi secara nasional. Dengan demikian diseminasi informasi secara nasional dapat lebih terstruktur, terukur, dan terintegrasi, serta transparan dan terjamin akuntabilitasnya.

Untuk mendukung tercapainya tujuan diseminasi informasi maka Kemeninfo juga mengeluarkan PerMen Kominfo No.7/PER/M.Kominfo/06/2010, tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media. Melalui Peraturan Menteri tersebut akan terjalin kemitraan antara pemerintah dan media, sehingga akan saling memperkuat dan terbangun keterbukaan serta kepercayaan antara pemerintah dan media, baik media cetak, elektronik serta media komunitas di bidang diseminasi informasi. Pengembangan kemitraan media diarahkan untuk meningkatkan peran, profesionalisme, dan kesamaan persepsi dalam meningkatkan pemerataan informasi, mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lebih lanjut Kemeinfo perlu untuk membakukan penyaluran informasi dilakukan melalui wadah komunikasi masyarakat yang disebut Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), hal ini dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan informasi yang terjadi masyarakat. Regulasi yang dilakukan Kemeninfo melalui PerMen Kominfo RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010, tentang Pedoman

Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Melalui PerMen tersebut, maka pada beberapa pasal menjelaskan tentang keberadaan KIM, yaitu :

1. Lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi Pedesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga pemantau Media dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.
2. Lembaga Komunikasi Pedesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya disingkat KIM, yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Dikeluarkannya PerMen tersebut dilakukan karena melihat kondisi masyarakat yang belum mempunyai kemampuan cukup untuk menelaah berbagai informasi yang disebabkan karena kondisi sosial, ekonomis, dan kultural yang beragam. Selain itu keterbatasan akses serta kemampuan masyarakat untuk dapat memanfaatkan informasi belum memadai. Hal itu semakin diperkuat dengan kondisi wilayah geografis Indonesia yang menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi di beberapa wilayah, seperti daerah terpencil, daerah perbatasan, ataupun wilayah tertinggal lainnya.

2. Komunikasi Pembangunan

Komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara (Rochayat Harun & Elvinaro; 2011; 161). Mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk yang multi etnis, dengan beragam tingkat pendidikan, status sosial, pekerjaan, maka dimungkinkan penerimaan pesan tidak akan mudah diterima secara sama. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah (pedesaan), yang minim dengan akses informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Sehingga dibutuhkan kehadiran agen perubahan ini, yang diharapkan dapat meminimalkan perbedaan tersebut.

Dikatakan Sumadi Dilla (2007; 144), bahwa fungsi komunikator pembangunan mengandung arti usaha pendidikan, persuasif, penyampaian ide-ide

baru (inovasi) bertujuan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, wawasan, dan cita-cita menuju pada suatu perubahan sikap dan tingkah laku. Sehingga terlihat bahwa agen perubahan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam memberikan wawasan pengetahuan kepada khalayak, dalam hal ini adalah masyarakat sebagai penerima pesan pembangunan. Melalui agen perubahan inilah diharapkan akan terjadi proses diskusi untuk menyamakan pemahaman khalayak, yang pada akhirnya didapatkan perubahan perilaku khalayak yang mendukung program-program yang sudah digulirkan pemerintah.

Lebih lanjut dikatakan oleh Jim Ife (2002; 364) bahwa pengembangan masyarakat melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk saling bekerja, mengembangkan struktur yang berarti orang-orang menjadi bergantung satu sama lain untuk mencapai segala sesuatu, dan mencari cara-cara yang memberi pengaruh kepada setiap orang dan dihargai orang lain.

3. Agent of Change

Rogers dan Shoemaker (dalam UT; 2005;62), *agent of change* adalah petugas profesional yang mempengaruhi keputusan keputusan inovasi klien (masyarakat yang dibina) menurut arah yang diinginkan lembaga perubahan.

Oleh karena itu, sebagai *agent of change*, KIM dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Dengan demikian tercapai kesamaan persepsi di antara individu dalam masyarakat. Tentunya hal ini akan memudahkan terciptanya implementasi program seperti yang sudah direncanakan. Sebagai pihak yang profesional, maka seorang *agent of change* harus mempunyai kualifikasi sebagaimana halnya seorang profesional. Seperti dikatakan oleh Duncan dan Zaltman (dalam UT;2005;63), kualifikasi *agent of change* adalah :

1. Kualifikasi teknis, yaitu kompetensi teknis dalam tugas spesifik dari proyek perubahan yang bersangkutan.
2. Kemampuan administratif, yaitu persyaratan administratif yang paling dasar dan elementer, yaitu kemampuan untuk mengalokasikan waktu untuk persoalan-persoalan yang relatif mendetil (*detailed*)

3. Kemampuan hubungan antarpribadi. Suatu sifat yang paling penting adalah empati, yaitu kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi diri dengan orang lain, berbagi akan perspektif dan perasaan mereka dengan seakan-akan mengalaminya sendiri.

Menurut Rogers (dalam Denis Mc Quail & Sven Windahl; 1996; 123) bahwa gap informasi disebabkan karena adanya gap dalam perhatian perilaku dan sikap, tidak hanya pengetahuan khalayak. Oleh karena itu, gap informasi dapat diminimalisir melalui aktivitas diseminasi informasi. Fungsi inilah yang dilakukan KIM sebagai *agent of change*, bahwa KIM mampu mendorong masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam pembangunan.

4. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Dibubarkannya Departemen Penerangan pada masa reformasi, menyebabkan terjadinya kekosongan infrastruktur dalam bidang informasi dan komunikasi di daerah. Untuk mengisi kekosongan tersebut maka dalam upaya menyalurkan aspirasi masyarakat perlu dikembangkan wadah pemberdayaan masyarakat. KIM sebagai bentuk revitalisasi dari Klompencapir pada masa Orde Baru merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam proses demokratisasi. Tumbuhnya KIM disesuaikan dengan paradigma pembangunan yang bersifat bottom up, sebagai upaya masyarakat untuk membangun dirinya secara mandiri dengan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mencapai tujuan membangun masyarakat informasi.

Untuk membangun masyarakat informasi, maka peran KIM nyata-nyata sangat dibutuhkan, sehingga Kemeninfo perlu untuk menguatkan regulasi yang sudah ada dalam bentuk Peraturan Menkominfo No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010, tentang KIM bahwa yang dimaksud dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Dengan demikian, KIM sebagai penggerak ikut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di level bawah, dan membantu masyarakat menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pertemuan kelompok, baik secara formal maupun informal. Bersama-sama masyarakat, KIM merumuskan, menginformasikan, menerjemahkan, mengorganisir, dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Bahkan bersama-sama dengan masyarakat melakukan pengawasan serta pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dalam aktivitasnya KIM melakukan pengelolaan informasi, yang terdiri atas beberapa komponen yaitu :

1. **Akses Informasi** : mengenali kebutuhan kelompok, memecahkan masalah dengan mencari informasi dari berbagai sumber, memilah informasi berdasarkan bidang masalah, mengolah informasi, menyimpan informasi.
2. **Diskusi Informasi** : menyusun urutan masalah, merumuskan masalah tersebut, menguraikan secara rinci hal-hal yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti isi informasi
3. **Implementasi** : menerapkan informasi, menerapkan keputusan dalam tindakan, melakukan monitoring, evaluasi serta tindak lanjut
4. **Networking** : upaya menjalin hubungan dengan lembaga formal (pemerintah, perbankan, DPRD dan swasta) maupun informal (asosiasi profesi, LSM, media komunitas dan kelompok lain)
5. **Diseminasi** : menyebarluaskan informasi dengan didukung sejumlah ketrampilan
6. **Aspirasi** : dalam pertemuan, pengurus KIM mengajaak anggota masyarakat untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi, usulan-usulan serta harapan-harapan, menggali informasi dalam masyarakat

Mengingat demikian pentingnya peran KIM dalam pembangunan maka masyarakat tergerak untuk membentuk KIM di berbagai daerah. Berdasarkan data dari Kemeninfo pada tahun 2006 terdapat 3.942 KIM yang tersebar seluruh Indonesia. Selanjutnya Kemeninfo pada tahun 2009 melakukan pendataan

kembali yang memperlihatkan adanya peningkatan jumlah KIM di Indonesia, yaitu 5569 KIM.

Pembahasan

1. Sekilas Kota Pekalongan

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah Pantai Utara pulau Jawa dengan ketinggian 1 m di atas permukaan laut Jawa. Batas administratif sebelah utara laut Jawa, sebelah Timur kabupaten Batang, sebelah Selatan kabupaten Pekalongan dan kabupaten Batang. Kota Pekalongan memiliki luas wilayah \pm 45 km². Keadaan tanah di kota Pekalongan berwarna agak kelabu. Secara administratif terbagi atas 4 kecamatan yaitu : kecamatan Pekalongan Timur, Pekalongan Barat, Pekalongan Utara dan Pekalongan Selatan, dan setelah pemekaran terbagi atas 47 kelurahan. Pekalongan dikenal mendapat julukan *kota batik*, karena batik Pekalongan memiliki corak yang khas dan variatif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Pekalongan menempati ranking 5 se-Jawa Tengah, dimana mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 71,9 dan tahun 2010 sebesar 74,47, sementara itu IPM rata-rata Jawa Tengah sebesar 71,6. Untuk tahun 2013 ini, Pekalongan mengalokasikan APBD \pm Rp. 636 Miliar, berdasarkan RAPBD 2013, dengan perkiraan untuk belanja pegawai sebesar 53 % dan belanja pembangunan sebesar 47 %.(Sri Budi Santoso; 2012)

2. Kelurahan Kraton Kidul

Kelurahan Kraton Kidul memiliki luas 21,596 Ha, berbatasan dengan wilayah :

1. Utara : Kelurahan Kraton Lor
2. Selatan : Kelurahan Bendan
3. Barat : Kelurahan Kramatsari
4. Timur : Kelurahan Kraton Lor.

Sebagai wilayah pantai, maka curah hujan 2,5 mm/tahun, tidak heran jika suhu udara berkisar antara 32-33° C. Kelurahan Kraton Kidul terdiri atas 3 RW, dan 17 RT, yang secara keseluruhan dihuni oleh 2.043 orang. Jika dilihat dari

struktur penduduk maka jumlah penduduk Kelurahan Kraton Kidul 2.043 orang., tersebar sebagai berikut :

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1.025
Perempuan	1.018

Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan cukup berimbang, melihat kondisi ini maka memungkinkan jika setiap orang bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga tidaklah berbeda, Berdasarkan tingkat pendidikan, masyarakat Kraton Kidul memang masih dalam kondisi yang belum baik. Penduduk yang mengenyam bangku SLTA masih sedikit, dominasi tingkat pendidikan berada di level SD dan SLTP. Kondisi demikian yang menuntut adanya perbaikan masyarakat di bidang pendidikan, dengan pendidikan yang memadai maka harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik bukanlah hal yang mustahil. Terlihat dalam tabel berikut ini kondisi pendidikan penduduk Kraton Kidul .

Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Kraton Kidul

TK	52
SD	327
SMP/SLTP	347
SMA/SLTA	431
Akademi/D1-D3	45
Sarjana/S1-S3	103

Di sinilah KIM Kraton Kidul terdorong untuk membantu masyarakat dalam memperoleh informasi tentang pentingnya pendidikan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Tanpa pendidikan yang cukup, maka kondisi ekonomi juga sulit meningkat. Melalui KIM inilah masyarakat mengetahui tentang sekolah gratis, paket C, bahkan tentang tawaran beasiswa untuk studi lanjut di perguruan tinggi baik dari pemerintah maupun swasta..

Sementara itu berdasarkan sebaran mata pencaharian penduduk Kraton kidul, maka terbanyak ada di industri swasta, yaitu industri tekstil. Ini memungkinkan, mengingat bahwa Kota Pekalongan adalah ‘kota batik’, sehingga industri batik marak berdiri di Pekalongan. Sayangnya karena tingkat pendidikan yang rendah, kebanyakan bekerja sebagai buruh saja, mulai buruh batik, buruh lipat, hingga penjual. Adapun sebaran mata pencaharian penduduk Kraton Kidul adalah sebagai berikut :

Sebaran Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Pegawai Negeri Sipil	42
TNI/POLRI	3
Swasta	299
Wiraswasta/pedagang	182
Petani	-
Pertukangan	20
Buruh Tani	-
Pensiunan	35
Nelayan	8
Pemulung	-
Jasa	48

3. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kraton Kidul dalam Diseminasi Informasi

Berbagai penghargaan telah diterima KIM Kraton Kidul, terakhir adalah penghargaan Adikarya Pengabdian Sewaka dari Kemeninfo pada tanggal 17 Agustus 2013, sebagai penghargaan atas aktivitas KIM dalam ‘Penyebarluasan Informasi Melalui Koran Suara Kampung’ bersama dengan lembaga KIM lainnya yaitu : KIM Sukabungo Jawa Barat, Media Center Kota Palembang, Media Center Kota Singkawang dan Gerakan Pemuda Ansor.

KIM Kraton Kidul berdiri pada 26 desember 2008, latar belakang pembentukan KIM Kraton Kidul tidak lain untuk memberikan informasi yang aktual dan faktual kepada masyarakat. Seringkali masyarakat menerima informasi yang salah bahkan melalui sumber yang tidak tepat, informasi yang diterima menyesatkan. Informasi yang salah bahkan dapat menjadi isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk menghindari adanya kesalahan

bahkan fitnah, maka KIM Kraton Kidul perlu dibentuk dalam rangka memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang berbagai informasi yang beredar di masyarakat. Melalui KIM diharapkan masyarakat tidak resah terhadap segala persoalan yang mereka hadapi, baik itu persoalan pribadi, kelompok, maupun organisasi, baik itu tentang masalah kesehatan, pendidikan, bahkan ekonomi sekalipun.

Dalam perkembangan tahun 2009 KIM di kota Pekalongan meningkat menjadi 31 KIM yang tersebar di 47 Kelurahan Kota Pekalongan. Namun bertambahnya jumlah KIM belum diikuti dengan meningkatnya kualitas KIM. Sehingga dengan melibatkan instansi terkait seperti dilakukannya pelatihan teknologi informasi, penguasaan komputer, dan internet serta pelatihan lainnya. Dan tahun 2010 masing-masing kelurahan difasilitasi telecenter untuk menyebarkan informasi di lingkungan masing-masing.

Tugas KIM mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi, bahwa masyarakat aktif mencari, peduli pada segala bentuk informasi dan peka terhadap informasi baru yang diperolehnya serta berusaha memahami informasi yang diterimanya. Selanjutnya masyarakat memilah informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat tentunya dengan melakukan diskusi lebih dulu dengan anggota kelompok untuk memilih informasi yang tepat disampaikan kepada masyarakat. Sehingga KIM dapat dijadikan sebagai mitra dialog dalam mendukung pelaksanaan kebijakan publik dan monitoring pelaksanaannya.

Untuk memudahkan kerjasama antar anggota KIM maka dilakukan pembagian tugas pemberdayaan, yaitu : pemberdayaan informasi dan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan informasi meliputi : penyerapan informasi, diseminasi informasi, penguatan informasi, mekanisme *complain* warga serta didiskusikan, menindaklanjuti *komplain*, fasilitasi informasi warga dengan SKPD/lembaga terkait serta melakukan fasilitasi dengan lembaga lain. Sedangkan pemberdayaan ekonomi meliputi : penyerapan informasi, akses fasilitas, implementasi informasi, klasifikasi potensi, penguatan pasar, membangun *networking* untuk penguatan potensi, memperluas wilayah

penguatan, penguatan usaha warga dan perluasan pasar serta realisasi kemandirian.

Berbagai cara dilakukan KIM dalam penyebaran informasi, dengan melalui berbagai kesempatan dengan menggunakan media serta teknik yang beragam dengan harapan dapat membawa perubahan bagi masyarakat Kelurahan Kraton Kidul. Media yang digunakan dalam proses diseminasi informasi adalah :

1. Media tradisional : musik Jawan, yang diberi nama ‘Musik Jawan Al-Imani’

Melalui kelompok musik ini, maka KIM dapat lebih mudah melakukan penyebaran informasi, dimana isi lagu yang dibawakan tidak hanya bertema agama, tetapi juga tentang berbagai isu-isu yang saat itu trend di masyarakat, misalnya tentang : tomcat, keamanan, jamkesmas yang diramu dalam irama musik rebana, yang selama ini identik dengan musik keagamaan.

2. Media *gethok tular*

Tradisi gethok tular menjadi satu salah satu media yang efektif, meskipun teknologi komunikasi marak berkembang. Cara ini ditempuh karena masyarakat sekitar sudah terbiasa dengan tradisi ini, mengingat kondisi tempat tinggal yang padat sehingga memudahkan proses persebaran melalui gethok tular.

3. Media cetak : leaflet, koran ‘Suara Kampung’

Media cetak ini dimanfaatkan sebagai salah satu alternative dalam penyebaran informasi. Koran ‘Suara Kampung’ juga memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk terlibat aktif dalam pertukaran informasi, yaitu dengan cara mengirimkan info atau artikel yang terkait dengan kebutuhan masyarakat Kraton Kidul. Masyarakat dapat mengirimkan hasil tulisannya ke : kim.kotapekalongan@gmail.com.

4. Media baru : internet

Internet digunakan dalam rangka membiasakan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi melalui teknologi komunikasi yang saat ini lebih mengedepankan pada kecepatan. Melalui internet, masyarakat dapat

langsung mengakses informasi secara langsung ke lembaga atau instansi terkait dengan kebutuhan warga, misalnya tentang pengembangan usaha melalui jejaring dengan lembaga terkait. Melalui jejaring ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam bidang ekonomi.

Bahkan terkait dengan diseminasi informasi, Pemkot Pekalongan telah melakukan *Kick off Meeting* pengembangan TIK pada bulan Agustus 2008 dengan penancangan salah satu program unggulan yaitu migrasi ke legal software berbasis *free open source software* (FOSS) yang diharapkan tuntas pada pertengahan 2010. Bahkan untuk mendukung program tersebut, Walikota Pekalongan menguatkan keputusannya dalam Keputusan Walikota Pekalongan No.020/024 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pemakaian dan Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Free Open Source Software (FOSS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan dikuatkan lagi melalui Peraturan Walikota Pekalongan No.12A tahun 2010 tentang Migrasi Perangkat Lunak Legal Berbasis Free Open Source Software (FOSS) Pemerintah Kota Pekalongan.

Terkait dengan fungsi KIM dalam Diseminasi Informasi Nasional, KIM Kraton Kidul melakukan pengelolaan informasi bersama dengan lembaga independen, tokoh masyarakat, instansi melalui SKPD, dan menyebarkannya kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat. Bahkan KIM Kraton Kidul memfasilitasi pertemuan UKM dengan pemodal, baik perseorangan ataupun lembaga dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam diseminasi informasi, KIM sebagai ujung tombak di level bawah mampu berfungsi jika melakukan kemitraan dengan berbagai instansi terkait, bergantung pada isu dan kebutuhan masyarakat masyarakat. KIM sebagai salah satu bentuk komunikasi masyarakat mampu mengatasi hambatan informasi masyarakat di pedesaan, daerah tertinggal, maupun daerah perbatasan. Kemeninfo sebagai mitra utama berfungsi untuk memfasilitasi

serta melakukan pendampingan dari mulai pembentukan KIM sampai proses diseminasi informasi kepada masyarakat.

Kemitraan antara KIM Kraton Kidul dan Dinas Kemeninfo di daerah serta Kemeninfo Pusat harus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan berbagai informasi yang beredar di masyarakat. Masyarakat yang mampu mengelola informasi dengan tepat tentu saja akan memberikan dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sehingga tujuan Diseminasi Informasi Nasional mencerdaskan bangsa, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat integritas nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia tercapai. Sebagai lembaga layanan publik KIM Kraton Kidul mampu menjawab tantangan global menciptakan masyarakat informasi di wilayah kelurahan Kraton Kidul.

Daftar Pustaka :

- Dilla, Sumadi., 2007, *Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media,
- Harun, Rochajat dan Ardianto, Elvinaro, 2011, *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial*, Jakarta, Radjawali Pers
- Ife, Jim, 2002, *Community Development : Community Based Alternatives in an Age of Globalisation*, Malaysia, Cath Godfrey
- Mc Quail, Denis and Sven Windahl, 1996, *Communication Models*, Singapore, Longman Singapore Publishers (Pte) Ltd
- Nasution, Zulkarimen.,2004, *Komunikasi Inovasi*, Jakarta, UT

Bahan Bacaan Lain :

- Peraturan Menkominfo No.17/PER/M.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional
- Peraturan Menkemeninfo No.7/PER/M.Kominfo/06/2010, tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media
- Peraturan Menkominfo RI No : 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
- Peraturan Menkominfo Nomor : 22/PER/M.KOMINF/12/2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota
- Santoso, Sri Budi, 2 April 2013, *Makalah Prakarsa Pengembangan KIM Kota Pekalongan*, Paparan Dalam Rangka Kunjungan Kerja KIM dan Pemkab Wonosobo